



SUKMA: JURNAL PENDIDIKAN

ISSN: 2548-5105 (p), 2597-9590 (e)

Volume 6 Issue 2, Juli-Desember 2022, pp.147-164

<https://doi.org/10.32533/06202.2022>

www.jurnalsukma.org

Objektifikasi dan Subjektifikasi Murid dalam Tiga Pranata Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat

Khairil Azhar

Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

email: besoreal@gmail.com

Babang Robandi

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung

email: brobandi@upi.edu

Abstract

This paper tries to show how objectification tends to occur in family, community and school education. Theoretically, objectification is opposed to subjectification. Objectification means positioning children, students or individuals as objects of education. On the other hand, subjectification is their positioning as subjects or active agents of learning. For this reason, a 'middle

way' conceptualization is needed so that a conception of education in families, schools and communities is obtained that is oriented towards facilitating the natural development of students' potential or nature

Keywords: subjectification, objectification, family education, school education, family education, agent of learning.

Abstrak

Tulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana objektifikasi cenderung terjadi dalam pendidikan keluarga, lingkungan masyarakat maupun sekolah. Secara teoretis, objektifikasi dilawankan dengan subjektifikasi. Objektifikasi berarti memosisikan anak-anak, murid-murid atau individu dalam posisi sebagai objek pendidikan. Sebaliknya, subjektifikasi adalah pemosisian mereka sebagai subjek pembelajar atau active agent of learning. Untuk itu diperlukan satu konseptualisasi 'jalan tengah' sehingga didapat suatu konsepsi pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang berorientasi pada fasilitasi perkembangan potensi atau kodrat murid-murid secara wajar.

Kata Kunci: subjektifikasi, objektifikasi, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, agent of learning .

A. Pendahuluan

“... pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”

--*Dasar-dasar Pendidikan* (Ki Hajar Dewantara, 1936)

Jika kata yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah ‘menuntun’ kenapa banyak sekali dalam dunia pendidikan, bahkan dalam visi-misi berbagai sekolah, yang menggunakan kata ‘membentuk’ atau hendak ‘menjadikan’ para murid menjadi ini dan itu, sehingga seolah-olah sekolah atau para guru menjadi demikian maha kuasa? Tidakkah itu terlalu jumawa dan bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sudah memberikan manusia ‘segala kekuatan kodrat’?

Definisi yang diberikan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga searah dengan pengertian Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dalam pengertian ini terdapat tiga hal yang menarik. *Pertama*, konsep ‘menuntun’ ditafsir menjadi “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran”. *Kedua*, terdapat konsep yang lebih tegas tentang cara mendidik atau menuntun, yaitu bahwa muridlah yang difasilitasi untuk “secara aktif mengembangkan potensi dirinya” atau ruang untuk menjadi pembelajar aktif—*active agent of their learning* (Azhar, 2017). *Ketiga*, konsep keselamatan dan kebahagiaan sepertinya hendak diurai dalam batasan-batasan “memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

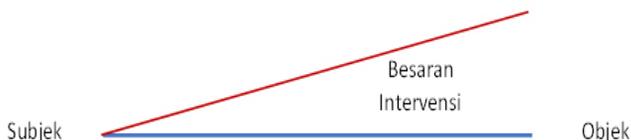
Hemat penulis, terdapat dua potensi persoalan edukatif dalam definisi UU Sisdiknas jika dibanding dengan definisi Ki Hajar Dewantara. *Pertama*, konsepsi “usaha sadar dan terencana” berpotensi membawa paradigma dan praktik pendidikan pada cara berpikir eksesif sebagaimana diwakili di atas oleh kata ‘membentuk’ dan ‘menjadikan’. Sehingga pendidikan bisa jadi bukan lagi berisi tuntunan akan tetapi ragam preskripsi,

keharusan, perintah, aturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa menjadi demikian mengikat sehingga melemahkan atau bahkan mematikan kodrat yang berbeda-beda pada anak-anak.

Kedua, konsep keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan eksistensial dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi kabur atau bahkan hilang, dan berganti dengan batasan-batasan apa saja yang ‘wajib’ dipelajari dan dikuasai anak-anak dalam pendidikan mereka. Para pembuat definisi pendidikan di UU Sisdiknas terjebak hanya menentukan syarat-syarat (*conditions*) tetapi abai dengan perihal untuk apa syarat-syarat itu ditentukan. Sehingga patut dipertanyakan, apakah kalau anak belajar pelajaran agama tertentu dengan serta-merta mereka jadi selamat dan bahagia? Apakah kalau anak bisa mengendalikan diri dengan sendirinya mereka juga selamat dan bahagia? Bagaimana kalau mereka hanya “menahan diri” dalam ragam kasus karena jeri dengan intimidasi?

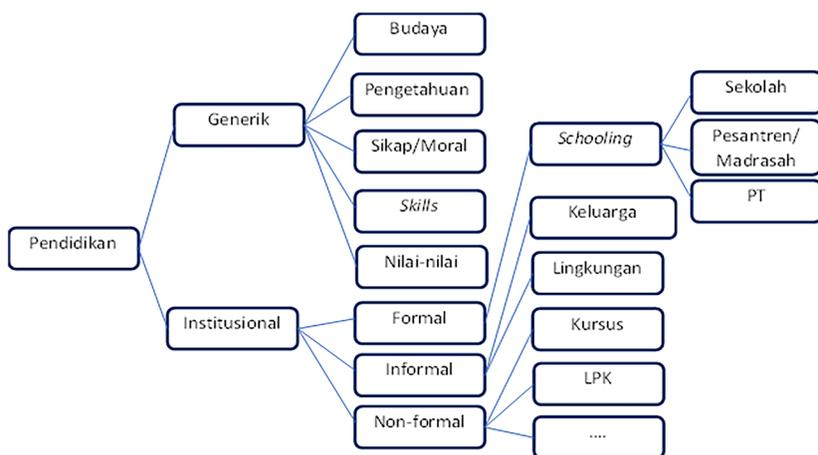
B. Subjektifikasi dan Objektifikasi

Pendefinisian yang kehilangan aspek eksistensial di atas adalah contoh kasus dari dilema pemikiran pendidikan, apakah murid-murid merupakan subjek atau sebaiknya objek pendidikan. Jika murid hendak ‘dibentuk’ atau ‘dijadikan’ menjadi ini atau itu, maka terjadi keterjebakan pada berpikir ‘objektif’ atau memosisikan mereka sebagai objek pendidikan atau mengalami objektifikasi (Laughnan et al, 2010; Rector, 2014; Oswell, 2013). Sebaliknya, jika murid-murid diposisikan sebagai manusia yang merdeka atas dirinya dan diandaikan memiliki kodrat-kodrat yang bisa tumbuh-berkembang dengan sendirinya—tanpa tuntunan—maka terdapat potensi keterjebakan dalam berpikir subjektif.



Bagan 1 Subjektifikasi versus Objektifikasi

Mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu cara terbaik adalah memilih 'jalan tengah'. Sehingga beliau sendiri memilih kata 'tuntunan' dan 'menuntun', yang berarti bahwa perkembangan ragam kodrat murid-murid ada yang memerlukan bantuan dan ada yang tidak. Dalam diagram di atas, tuntunan dibahasakan sebagai intervensi. Semakin sering dan besar guru-guru melakukan intervensi, semakin terobjektifikasi para murid, ketika semakin sedikit guru-guru melakukan intervensi, maka semakin tersubjektifikasi para murid. Guru-guru, misalnya, berlaku lentur: adakalanya membantu, hanya melihat dari jauh atau bahkan memberikan kebebasan penuh. Tidak di setiap saat mengarahkan murid-murid untuk melakukan ini dan itu. Dengan cara ini akan tumbuh murid-murid yang menjadi subjek atau agen yang aktif bagi dirinya, bukan sebaliknya menjadi *pas-sive-recipients* (Azhar, 2017)



Bagan 2 Makna dan Bentuk Pendidikan

Sementara itu, secara umum pendidikan bisa dikategorikan menjadi pendidikan dalam arti generik dan institusional atau kelembagaan. Ini misalnya bisa disimpulkan dari konsep pendidikan yang digariskan dalam UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan. Bagan 2 menunjukkan bagaimana kategorisasi pendidikan dalam kedua makna tersebut di Indonesia. Pemaknaan pendidikan secara generik berhubungan dengan tujuan dan

konten pendidikan dalam bentuk seluas-luasnya. Sementara pemaknaan secara institusional berarti pendidikan yang dikelola dalam pranata atau lembaga-lembaga formal, informal atau non-formal yang pada dasarnya menjadi dibatasi oleh tujuan, kultur, konten, nilai dan aspek lainnya dalam setiap lembaga.

Dalam tulisan ini, pengkutuban subjek versus objek di atas akan dijadikan dasar dalam mendiskusikan tiga pranata pendidikan: keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Penulis berusaha menunjukkan bagaimana objektifikasi cenderung terjadi, baik dalam pendidikan keluarga, lingkungan masyarakat maupun sekolah. Oleh karena itu diusahakan konseptualisasi 'jalan tengah' sehingga didapat suatu konsepsi pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang berorientasi pada fasilitas perkembangan potensi atau kodrat murid-murid secara wajar, tidak dengan objektifikasi maupun subjektifikasi berlebihan yang bersifat detrimental. Dalam hal ini, dengan demikian, akan dilihat sejauh mana misalnya konsep jalan tengah Ki Hajar Dewantara mendapat peluang atau sebaliknya mendapat tantangan.

C. Keluarga dan Pendidikan

Saat ini terdapat beragam jenis atau tipe keluarga di tengah masyarakat. Modernisasi, misalnya, telah menyebabkan pergeseran bentuk keluarga tradisional. Bukan hanya di kota bahkan di desa-desa juga sudah jamak kedua orang tua bekerja sehingga anak diasuh bukan oleh orang tua kandung. Hal ini bisa karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi atau karena alasan-alasan lainnya. Demikian pula, terdapat keluarga di mana hanya ada satu orang tua tunggal, orang tua tiri, tanpa orang tua dan seterusnya.

Tabel 1 Bentuk-bentuk Keluarga

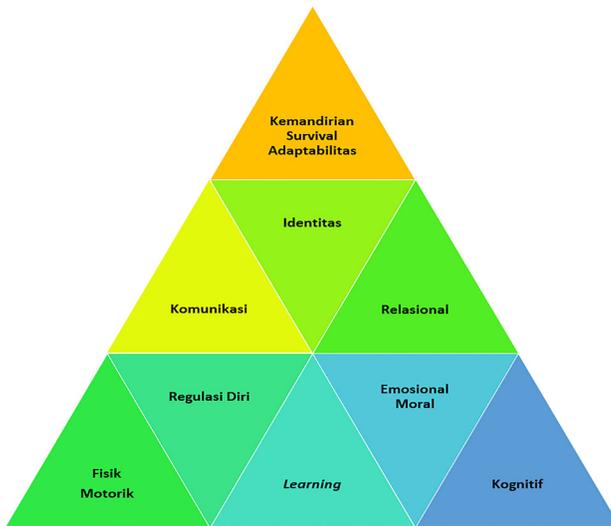
Jenis	Keterangan
Keluarga Inti	Dua orang tua dan anak [-anak]
Keluarga Luas	Ditambah para paman, bibi, sepupu
Pengasuhan Kakek/ Nenek	Kakek-Nenek memelihara cucu
Orang Tua Tunggal	Bapak saja atau ibu saja dengan anak
Keluarga Tanpa Anak	Memilih untuk tidak punya anak
Keluarga Tiri	Akibat cerai, berpisah, anak angkat
Keluarga Gay	Adopsi anak
....

Dengan kenyataan ini, adalah tidak tepat jika dibayangkan atau diasumsikan hanya terdapat satu bentuk keluarga ideal dan kemudian itu dijadikan sandaran dalam melakukan konseptualisasi bagaimana pendidikan di tingkat keluarga dilakukan. Perhatian pada variasi keluarga seperti dalam Tabel 1 akan menentukan model atau pola pendidikan. Dalam hal ini, konsep “orang tua” misalnya lebih sebagai simbol yang merepresentasikan “*the more acknowledgeable other*” atau orang dewasa atau orang yang lebih dewasa yang hidup atau mendampingi anak dalam pendidikan keluarga.

Juga tidak bisa diasumsikan begitu saja bahwa dalam keluarga-keluarga tradisional yang lengkap, di mana misalnya ada ayah dan ibu yang memiliki waktu cukup bersama anak-anak mereka, pendidikan di tingkat keluarga berjalan dengan baik. Dalam hal ini adanya orang tua tak menjamin berjalannya fungsi-fungsi pendidikan keluarga. Sebab tingkat keterdidikan orang tua, misalnya, menjadi penentu utama—yakni keterdidikan dalam arti secara substantif, bukan diartikan sebagai tingkat pendidikan berdasarkan kepemilikan ijazah. Menuntun anak dalam kehidupan, seperti dalam definisi pendidikan Ki Hajar Dewantara, memerlukan motivasi dan kecakapan yang sering kali instingtif dan bersifat *tacit* atau belum tentu dipelajari atau tertulis secara akademis (Dewantara, 1936).

Bagan 3 menunjukkan tujuan dari pendidikan keluarga.

Pada puncak bagan berbentuk segitiga terdapat tujuan utama dari arah pendidikan keluarga, yang pada dasarnya juga menjadi tujuan pendidikan pada umumnya. Dalam definisi UU Sisdiknas, misalnya, terdapat frase “keterampilan yang diperlukan dirinya” yang sebenarnya mengacu pada kemandirian dalam berbagai hal, seperti secara ekonomi dan sosial. Kemandirian lebih jauh bisa dirinci menjadi kemampuan dan keberhasilan untuk bertahan hidup (*survival*) dan beradaptasi di mana pun seseorang berada. Untuk dan dalam kemandirian terdapat unsur-unsur seperti kecakapan belajar, kemampuan berkomunikasi, kecerdasan emosional dan seterusnya.



Bagan 3 Tujuan Fungsional Pendidikan Keluarga
Diolah dari Gonzalez-Mena, 2017; Oswell, 2013

Kemandirian, sesuai konseptualisasi teoretis pada bagian pengantar, merupakan hasil dari proses subjektifikasi, keberhasilan menjadi subjek yang berpikir, bersikap dan bertindak mandiri. Dalam konteks pendidikan, kemandirian bisa terwujud ketika anak-anak secara bertahap diberi ruang untuk mandiri, tidak selalu serba diatur, diberi kesempatan untuk memilih dan membuat keputusan dan seterusnya. Anak-anak yang gagal mandiri, meskipun secara biologis sudah dewasa, bisa jadi karena selalu mengalami “*feeding*”, senantiasa disuapi, dimanjakan, atau

menjadi korban tindakan obsesif orang tua.

Pendidikan dalam keluarga biasanya dijalankan dan mengantar pada kemandirian dalam rentang waktu yang beragam. Terdapat anak-anak yang sejak usia belia sudah 'terpaksa' untuk mandiri, misalnya karena kematian atau berpisah dari orang tua. Namun di sisi lain terdapat anak-anak yang bahkan sudah selesai berkuliah pun masih tinggal atau tergantung pada orang tua. Meskipun tak jarang juga anak-anak yang masih tinggal bersama orang tua tersebut adalah karena diperlukan, misalnya untuk merawat dan sebagainya.

Tabel 2 Fungsi Pendidikan Keluarga

Fungsi Pengasuhan	Fungsi Struktural
Kebutuhan dasar: makanan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan	Pengarahan
Kasih sayang	Internalisasi nilai-nilai
Perhatian	Pembiasaan tanggung jawab
Penerimaan	Membuat keputusan
Waktu	Sosialisasi
Dukungan	Penegakan aturan
....	Penyelesaian masalah
....

Dalam hal ini, untuk meningkatkan keterdidikan orang tua (kandung, angkat, pengasuh, pendamping) misalnya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan *parenting* atau bimbingan keorang-tuaan (*parentship*). Keterdidikan itu misalnya diukur dengan tingkat kemampuan orang untuk melakukan fungsi pengasuhan (*nurturance*) dan fungsi struktural (<https://centerforparenting-education.org/>).

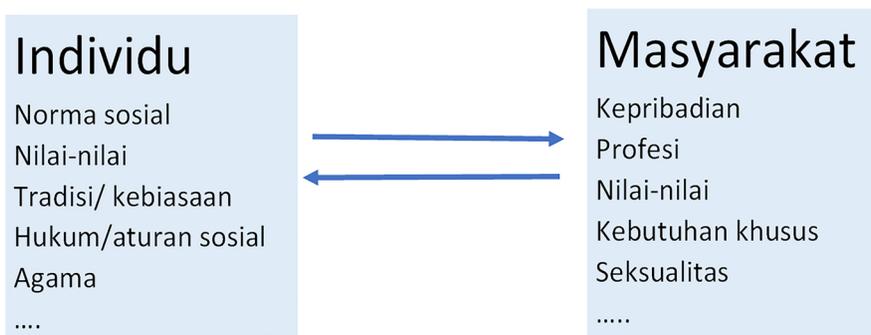
Untuk memastikan pendidikan dalam keluarga, sebagai kesimpulan, harus dipastikan bahwa anak-anak adalah subjek dan bukan objek. Intervensi yang berlebihan dari orang tua akan membuat anak-anak terobjektifikasi, sehingga potensi-potensi mereka untuk menjadi subjek yang mandiri atau agen bagi dirinya sendiri (*active agents*) bisa menjadi pudar. Sebaliknya, ketika orang tua sama sekali membebaskan atau memanjakan,

tanpa memastikan fungsi-fungsi struktural berjalan dengan baik, maka anak-anak juga akan berisiko mengalami masalah subjektif, seperti egosentrisme, tidak mandiri atau dependen, tidak taat peraturan, dan seterusnya.

D. Masyarakat dan Pendidikan

Pendidikan lingkungan sosial berdasar pada konsep bahwa sebagai makhluk sosial, setiap manusia pada dasarnya hidup dalam satu lingkungan sosial-budaya tertentu bersama manusia lainnya, yang mungkin jadi saling terikat karena persamaan kepentingan, wilayah, administratif, agama atau perasaan senasib. Lingkup dan bentuknya bisa berbeda-beda. Secara teritorial bisa berupa komunitas komunal dalam satu kampung atau lebih luas seperti desa, kecamatan, sampai pada satu negara. Bahkan kini juga ada istilah komunitas global. Secara bentuk, lingkungan sosial-budaya bisa berupa keluarga luas, agama, etnis, dan berbagai latar belakang lainnya.

Anak-anak yang lahir dalam satu lingkungan sosial secara formal atau non-formal menerima pendidikan sosial-kultural, ideologis seperti nilai-nilai, pengetahuan dan moralitas, baik secara generik maupun institusional. Sehingga kepribadian, kebiasaan, cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak mereka sedikit banyak akan merepresentasikan sistem sosio-kultural di dalam mana mereka tumbuh dan berkembang.



Bagan 4 Hubungan “Edukatif” Individu dan Masyarakat

Dalam hal ini, secara umum, terdapat pola pengaruh-mempengaruhi. Adakalanya kultur atau struktur sosial yang mempengaruhi individu dan adakalanya individu yang mempengaruhi struktur sosial atau kultur (Armer, 1977; Barker, 2005). Struktur sosial mempengaruhi atau membentuk individu seperti melalui bahasa, pembiasaan-pembiasaan, tradisi, nilai-nilai dan sebagainya. Sementara masyarakat dipengaruhi oleh individu atau sekelompok individu ketika transformasi atau evolusi sosial. Transformasi atau evolusi ini bisa terjadi sebagai konsekuensi alamiah dari dinamika sosial karena faktor-faktor eksternal atau internal, atau ketika terdapat apa yang biasa disebut sebagai agen perubahan (*agents of change*).

Pada umumnya, wacana pendidikan berkuat pada bagaimana mengintegrasikan anak-anak atau individu ke dalam struktur sosial (Ritzer et al., 2003; Spencer, 1974), yang dipastikan secara institusional, misalnya melalui persekolahan. Dalam model-model pendidikan yang berdasar pada fungsionalisme struktural, di mana penegakan orde atau ketertiban sosial menjadi hal yang paling utama, walaupun akan ada perubahan, maka sifatnya lebih evolutif atau perubahan secara terkendali, perlahan-lahan atau berskala kecil. Namun kecenderungan ini dikritik oleh kalangan sosiolog pendidikan kritis, di mana mereka berpandangan bahwa pendekatan yang demikian itu justru menimbulkan stagnasi sosial, melanggengkan otoritarianisme, penindasan sosial dan sebagainya (e.g. Freire, 1970/2005). Dalam sistem sosial yang sudah demikian terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan kelas atas, sebagai contoh, akan sulit bagi masyarakat yang berada di kelas bawah untuk bisa melakukan mobilisasi status sosial-ekonomi mereka karena mereka tidak atau kurang memiliki akses dan aset, yang misalnya didapat dari pendidikan yang baik.



Bagan 5 Pendidikan, Orde Sosial dan Perubahan Sosial

Dalam satu komunitas atau dalam sistem sosial yang lebih besar atau mungkin juga lebih longgar, individu-individu memiliki peran sosial serta harapan akan peran yang diberikan oleh masyarakat. Peran ini, di satu sisi terkait dengan keberlangsungan struktur sosial dengan berbagai aspeknya, ketika di sisi lain peran ini berhubungan dengan dinamika dan perubahan sosial. Peran dan harapan peran ini bisa jadi relatif ajeg atau bisa saja berubah cepat atau lambat, tergantung pada dinamika sosial atau individu.

Sehubungan dengan tujuan tulisan ini, yakni untuk melihat bagaimana objektivasi terjadi atau sebaliknya subjektivasi yang terjadi dalam pranata pendidikan, bisa dijelaskan sebagai berikut. Subjektivasi yang positif terjadi ketika satu masyarakat, komunitas atau sistem sosial memberi ruang yang cukup bagi individu-individu anggota masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat atau potensi mereka. Sebaliknya, objektivasi terjadi ketika individu tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan diri, mendapatkan tekanan sosial yang mungkin disebabkan perbedaan peran yang diberikan dengan harapan peran yang diinginkan, atau mungkin merasa tidak “diorangkan” dan memilih keluar dari komunitas, seperti dengan merantau. Pendidikan lingkungan sosial yang baik adalah yang berhasil melakukan pewarisan kultural (*cultural content*)

dan di saat bersamaan memberi ruang yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan individu sehingga mereka di samping menjadi “pewaris” juga menjadi agen perubahan sosial.

E. Sekolah dan Pendidikan

Sekolah merupakan salah satu alat bagi masyarakat atau sistem sosial untuk menjalankan pendidikan. Dalam model yang linear atau *top-down*, sekolah dibentuk oleh masyarakat (komunitas sosial berbasis teritorial dan/atau pemerintah) dengan berbagai tujuan, mulai dari konservasi sosio-kultural sampai dengan perubahan sosial. Tapi adakalanya sekolah diinisiasi atau dibangun dan dijalankan oleh individu, kelompok sosial yang tidak berbasis administrasi wilayah, perusahaan dan seterusnya. Namun dengan adanya apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional, terdapat kewajiban dari sekolah atau lembaga mana pun untuk memenuhi syarat-syarat kependidikan tertentu (UU No. 20/2003).

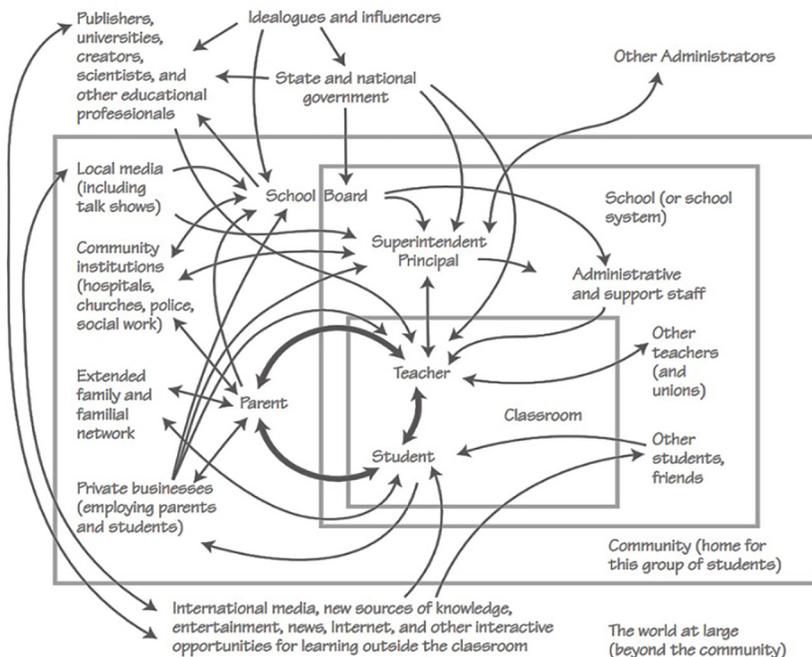


Bagan 6 Fungsi Sosial Pendidikan

Sebagai instrumen sosial, dalam model fungsionalisme, sekolah menjalankan fungsi-fungsi pendidikan bagi tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau satu sistem sosial (Ballantine & Hammack (2012)). Fungsi pertama disebut sosialisasi, di mana anak-anak atau individu belajar berbagai pengetahuan, norma, nilai dan kecakapan yang diperlukan supaya fungsional dalam masyarakat. Fungsi kedua disebut sebagai integrasi sosial, di mana siapa pun yang berada dalam satu komunitas atau sistem sosial harus tunduk pada serangkaian pranata,

tata aturan, dan nilai-nilai. Fungsi ketiga disebut sebagai **penempatan sosial**, di mana pendidikan menjadi semacam kendaraan untuk pengembangan kapasitas individu sehingga mereka bisa mendapat tempat yang tepat di tengah sistem sosial, misalnya dalam hal pekerjaan. Terakhir terdapat fungsi **inovasi sosial** dan kultural, di mana pendidikan memungkinkan dilakukannya penemuan-penemuan ilmiah, kreativitas, pengembangan seni budaya dan seterusnya. Tanpa inovasi, kemajuan atau perubahan ke arah perbaikan sosial tidak akan terjadi.

Dalam model ideal, hubungan sistem sosial, pendidikan dan sekolah direpresentasikan dalam Bagan 7 (Senge, 2006). Model relasional tersebut menunjukkan hubungan yang luas dan kompleks antara sebuah sekolah, keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mulai dari komunitas di mana sekolah berada sampai pada komunitas global. Selain relasi kultural, terdapat relasi ekonomi, politik, dan teknologis. Dalam setiap relasi tersebut terdapat relasi kuasa. Kuasa di sini bisa berupa kepentingan, filosofi, pengetahuan, pengalaman, dan praktik dalam masing-masing sumber pengaruh (Epstein, 2011). Misalnya, kuasa politik akan memaksakan gagasan-gagasan para politisi ke dalam kurikulum atau bagaimana sekolah dikelola. Kuasa ekonomi yang dimiliki para pemodal sekolah bisa saja memaksa sekolah untuk merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Atau kuasa teknologi informasi bisa memaksa dehumanisasi pendidikan, seperti berkurangnya frekuensi dan intensitas komunikasi langsung antar warga sekolah.



Bagan 7 Sistem Sosial, Pendidikan dan Sekolah (Senge, 2006)

Diskusi tentang relasi kuasa antara sekolah dengan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya ini mengantar kita pada tema objektifikasi dan subjektifikasi. Sebuah sekolah yang mampu mempertahankan dan bahkan mengembangkan otonomi atau independensi tentu tidak terjebak dalam upaya objektifikasi murid-murid. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang merumuskan kurikulum sesuai dengan kehendak penyandang dana misalnya, padahal itu tidak sesuai dengan konsep pendidikan sebagai fasilitasi perkembangan potensial atau kodrat murid-murid, dengan sendirinya telah melakukan objektifikasi. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini biasanya adalah dengan adanya semacam saringan, yang bisa berupa filosofi sekolah, riset dan diskusi bersama *stakeholders* (Saylor, Alexander & Lewis, 1981; Beauchamp, 1975; Epstein, 2011).

F. Kesimpulan

Tulisan ini dimulai dengan dilema objektifikasi dan sub-

jektifikasi dalam pendidikan. Objektifikasi berarti memosisikan anak-anak, murid-murid atau individu dalam posisi sebagai objek pendidikan. Subjektifikasi, sebaliknya, adalah pemosisian mereka sebagai subjek pembelajar atau *active agent of learning*. Konsep-konsep seperti ‘menjadikan’ dan ‘membentuk’ anak atau murid adalah contoh dari kecenderungan objektifikasi dalam pendidikan. Konsep ‘menuntun’ atau ‘tuntunan’ dari Ki Hajar Dewantara (1936) adalah contoh dari jalan tengah di antara kedua kutub ekstrem ini.

Pendidikan dalam keluarga akan berupa objektifikasi ketika anak-anak diposisikan sebagai manusia pasif di mana orang tua atau orang yang berposisi sebagai orang tua melakukan intervensi yang berlebihan. Dalam hal ini misalnya, orang tua serba mengatur atau menentukan, sehingga anak-anak tidak berlatih untuk mengembangkan potensi-potensi mereka, tidak dapat kesempatan untuk belajar membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, juga tidak tepat ketika orang tua sama sekali membebaskan atau memanjakan, tanpa memastikan fungsi-fungsi struktural keluarga berjalan dengan baik. Dalam kasus ini, anak-anak misalnya akan berisiko mengalami masalah subjektif, seperti egosentrisme, tidak mandiri atau dependen, tidak taat peraturan, dan seterusnya.

Dalam lingkungan pendidikan satu masyarakat, subjektivasi positif akan terjadi ketika individu-individu (misalnya anak-anak) mendapat ruang yang cukup, fasilitasi atau dukungan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat atau potensi mereka. Sebaliknya, jika mereka justru mendapatkan tekanan sosial—misalnya ketika perbedaan antara peran yang diberikan dengan harapan peran yang diinginkan tidak terkonsolidasi—mereka mengalami objektifikasi. Pendidikan lingkungan sosial yang baik adalah yang berhasil melakukan pewarisan kultural (*cultural content*) dan di saat bersamaan memberi ruang yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan individu sehingga mereka di samping menjadi “pewaris” juga menjadi agen perubahan sosial.

Terakhir, dalam konteks persekolahan sebagai perpanjangan tangan pendidikan masyarakat, penting sekali bagi sekolah-sekolah untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan otonomi atau independensi supaya tidak terjebak dalam upaya objektifikasi murid-murid. Jangan sampai terjadi misalnya, sekolah-sekolah mengembangkan kurikulum atau program-program semata-mata sesuai dengan kehendak penyandang dana, yang berpotensi menghambat atau bahkan mematikan perkembangan potensial atau kodrat murid-murid. Oleh karena itu, penting sekali bagi sekolah-sekolah untuk memiliki dan menjalankan sistem saringan yang baik, yang biasanya berupa filosofi sekolah, tradisi riset, dan dialog-dialog dengan seluruh *stakeholders*.

BIBLIOGRAPHY

- Armer, M. (1977). *Education and social change: An examination of the modernity thesis*. Studies In Comparative International Development, 12(3), 86–99. doi:10.1007/bf02686512
- Azhar, K. (2017). *Human Agency in a Curriculum: an Analysis of an Indonesia's 2013 Curriculum for Primary Level*. (Master's Thesis). Tampere: Tampere University
- Beauchamp, G. A. (1981). *Curriculum Theory*. Illinois: The Kagg Press
- Barker, C. (2005). *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage.
- Ballantine, J. H. & Hammack, F. M. (2012). *The sociology of education: A systematic analysis* (7th ed.). NJ: Prentice Hall.
- Dewantara, K. H. (1936/1937). *Dasar-dasar Pendidikan*. Yogyakarta: Keluarga
- Epstein, J. (2011). *School, Family, and Community Partnerships*. Boulder: Westview Press
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: The Continuum International Publishing Group.
- Gonzalez-Mena, J. (2017). *Child, Family, and Community: Family-*

Centered Early Care and Education. New Jersey: Pearson

- Jordan, A., Orison, C., & Stack, A. (2008). *Approaches to learning: a guide for teachers*. Berkshire: McGraw-Hill Open University Press.
- Loughnan, S. et al. (2010). *Objectification leads to depersonalization: the denial of mind and moral concern to objectified others*. *European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol.* 40, 709–717.
- Oswell, David. (2013). *The agency of children: from family to global human rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rector, J. M. (2014). *The Objectification Spectrum: Understanding and Transcending Our Diminishment and Dehumanization of Others*. Oxford: Oxford University Press
- Ritzer, G & Stepnisky, J. (2011). *The wiley-blackwell companion to Major Social Theorists*. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Saylor, J.G., Alexander, W.M., Lewis, A.J. (1981). *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Senge, P., et al. (2012). *Schools That Learn*. New York: Crown Business
- Spencer, T. E. (1974). *Education and the Social Order*. *Peabody Journal of Education*, Vol. 51, No. 2